

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada tingginya frekuensi kegiatan di pusat-pusat perniagaan, sehingga permintaan jasa transportasi semakin tinggi. Sebagian besar masyarakat banyak menggunakan kendaraan, hal inilah yang mendorong semakin tingginya motorisasi penduduk dari tahun ke tahun, khususnya di daerah pasar, pertokoan, dan di sekolah, disinilah akan terjadi peningkatan lalu lintas dan parkir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi. *(Laurentia. (2012) Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi. Skripsi Sarjana Ekonomi, Program Sarjana Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).*

Permasalahan parkir sangatlah kompleks sehingga perlu untuk dikaji lebih mendalam. Ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Semakin besar volume lalu-lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan akan ruang parkir, bila kebutuhan akan ruang parkir tidak terpenuhi maka kendaraan tersebut akan mengambil parkir di tepi jalan di seputar kawasan tersebut, hal ini akan menimbulkan ruas jalan menjadi lebih sedikit sehingga akan terjadi kemacetan dan ketidak tertiban dalam berlalu-lintas. Jadi parkir di jalan raya harus diatur dan dibatasi dengan cara menyediakan ruang untuk parkir kendaraan sesuai dengan

kebutuhan sehingga tidak mengganggu aktivitas berkendara. (Laurentia. (2012) *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi. Skripsi Sarjana Ekonomi, Program Sarjana Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).*

Pajak merupakan pemberi kontribusi paling besar bagi penerimaan negara. Di Indonesia Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

(<http://www.scribd.com/doc/33422193/Pengantar-Hukum-Pajak-Indonesia>)

Pajak Negara terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) yang di atur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang di atur dalam UU No. 42 Tahun 2009, dan Bea Materai yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri dari 5 jenis pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan 11 jenis pajak daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), meliputi:

1. Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>)

Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas pendapatan yang berwenang menarik semua pajak daerah dari setiap objek pajak. Hal ini pun berlaku di Kota Bandung, yang merupakan salah satu kota wisata yang banyak di kunjungi oleh wisatawan. Kota Bandung menyediakan wisata makanan, wisata belanja, dan wisata alam. Aneka makanan dan *factory outlet* di daerah Dago dan Riau ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau. Wisata alam di Kota Bandung juga merupakan daya pikat bagi wisatawan, seperti Gunung Tangkuban Perahu, pemandian air panas Ciater, Kawah Putih, dan masih banyak lagi tempat wisata alam lain.

Kota Bandung didukung oleh fasilitas yang lengkap, seperti hotel, area rekreasi dan bermain keluarga seperti Kampung Gajah, Trans Studio, serta restoran dalam jumlah yang banyak. Udara Bandung yang sejuk membuat wisatawan nyaman untuk menikmati liburan di Kota Bandung. Akses jalan menuju Kota Bandung relatif mudah, terlebih dengan adanya jalan tol Cipularang yang membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung yang membuat para wisatawan menjadi lebih mudah untuk berwisata di Kota Bandung. Dengan demikian arus kendaraan di Kota Bandung menjadi semakin banyak sehingga bisnis parkir pun semakin berkembang guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang parkir. (*Christy, Sylvani. (2012) Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2006-2010. Skripsi Sarjana Ekonomi, Program Sarjana Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Laurentia (2012) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap penerimaan Pajak

Daerah Kota Cimahi”, didapatkan hasil bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi, serta memiliki keeratan hubungan yang kuat hal ini ditunjukkan dengan tingkat keeratan hubungan sebesar 0,53.

Berdasarkan hasil uraian diatas dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas tentang pajak parkir di Kota Bandung dan ingin mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah setempat, apakah berpengaruh signifikan seperti yang terjadi di Kota Cimahi, dilihat dari semakin berkembangnya Kota Bandung. Sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kotamadya Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak parkir yang dilakukan selama ini oleh pemerintah daerah Kotamadya Bandung.
2. Berapa besar kontribusi penerimaan yang berasal dari pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kotamadya Bandung.
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kotamadya Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah tindak lanjut dari identifikasi masalah yang dijabarkan diatas, yaitu untuk:

1. Mengetahui sistem pemungutan dan perhitungan pajak parkir yang dilakukan selama ini oleh pemerintah daerah Kotamadya Bandung.
2. Mengetahui besarnya kontribusi pendapatan asli daerah Kotamadya Bandung.
3. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kotamadya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya akan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir.

2. Bagi rekan mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai pajak daerah khususnya mengenai pajak parkir.

3. Bagi dinas pendapatan daerah Kotamadya Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sebagai evaluasi mengenai besarnya kontribusi penerimaan pajak parkir dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kotamadya Bandung.